



Implementasi Program Literasi Digital Berbasis *Smart Society 5.0* di Kabupaten Ciamis (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis)

Nida Nurpadilah*, Dini Yuliani, Regi Refian Garis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Jl. R. E. Martadinata No.150,
Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia, 46274

*Penulis Korespondensi : nidanurpadilah18@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the implementation of the Smart Society 5.0-based digital literacy program in Ciamis Regency, implemented by the Communication and Informatics Office (Diskominfo). This program is part of the local government's digital transformation to create a smart, inclusive, and adaptive society to the development of information technology. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, and data is obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation. The analysis is conducted using Charles O. Jones's theory of public policy implementation, which includes three main components: organization, interpretation, and implementation. The results show that organizationally, Diskominfo has a supportive structure and relatively competent human resources, although there are still limitations in the mastery of digital technology among employees. From an interpretation perspective, the digital literacy strategy is implemented through public education, hoax prevention, digital content provision, and social media utilization. Meanwhile, in terms of implementation, supervision is carried out through monitoring, regular reporting, the use of digital applications, and evaluation forums. Some obstacles faced include budget limitations, the digital divide between regions, uneven technological infrastructure, and the lack of specific evaluation indicators. Nevertheless, improvement efforts continue through human resource training, optimization of digital facilities and infrastructure, and cross-sector synergy. This study concludes that the implementation of the Smart Society 5.0-based digital literacy program in Ciamis Regency has been quite successful, but still requires strengthening human resources, evaluation policies, and equitable digital access in rural areas.*

Keywords: *Ciamis Regency; Diskominfo; Digital Literacy; Policy Implementation; Smart Society 5.0.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program literasi digital berbasis *Smart Society 5.0* di Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Program ini merupakan bagian dari transformasi digital pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Charles O. Jones yang mencakup tiga komponen utama: organisasi, interpretasi, dan penerapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara organisasi, Diskominfo telah memiliki struktur yang mendukung serta sumber daya manusia yang relatif kompeten, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital di kalangan pegawai. Dari segi interpretasi, strategi literasi digital dijalankan melalui edukasi masyarakat, pencegahan hoaks, penyediaan konten digital, dan pemanfaatan media sosial. Sedangkan dalam aspek penerapan, pengawasan dilakukan melalui monitoring, pelaporan berkala, penggunaan aplikasi digital, serta forum evaluasi. Beberapa hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kesenjangan digital antar wilayah, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta kurangnya indikator evaluasi yang spesifik. Namun demikian, upaya peningkatan terus dilakukan melalui pelatihan SDM, optimalisasi sarana dan prasarana digital, serta sinergi lintas bidang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program literasi digital berbasis *Smart Society 5.0* di Kabupaten Ciamis sudah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dari sisi SDM, kebijakan evaluasi, serta pemerataan akses digital di wilayah pedesaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lainnya dalam merancang kebijakan literasi digital yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi masa depan.

Kata kunci: Diskominfo; Implementasi Kebijakan; Kabupaten Ciamis; Literasi Digital; *Smart Society 5.0*.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Di era Revolusi Industri 4.0, digitalisasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kini, konsep *Smart Society 5.0* hadir sebagai evolusi dari transformasi digital, yang bertujuan menciptakan masyarakat berbasis teknologi dengan pendekatan yang lebih manusiawi. *Smart Society 5.0* tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data, tetapi juga mendorong integrasi nilai-nilai sosial untuk mewujudkan inklusi dan keberlanjutan dalam pembangunan.

Literasi digital memberikan kemampuan untuk membedakan antara realitas sosial dan realitas media. Literasi digital tidak terbatas pada penggunaan media saja, tetapi meluas pada kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mengapresiasi informasi (Fauzi & Marhamah, 2021). Melalui literasi digital informasi yang didapat oleh masyarakat tentu tidak langsung disebarluaskan sebelum dilakukan dianalisis atau dinilai akan kebenarannya.

Tingkat literasi digital masyarakat Indonesia baru 62% jika di bandingkan dengan Negara di Korea yang sudah 97%. Hal ini terbilang cukup rendah dikarenakan tingkat rata-rata literasi digital di ASEAN sudah 70%. oleh karena itu lanjutnya, diperlukan percepatan untuk mengejar tingkat literasi digital di Indonesia terutama di Daerah-daerah. hal ini perlu dilakukan guna mendorong masyarakat terhindar dari segala jenis bentuk penipuan berbaur teknologi dan bisa lebihsiap menghadapi era yang serba digital ke depan. Selanjutnya, Indonesia mengalami peningkatan dalam literasi digital, namun masih berada di tingkat "sedang". Menurut survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Katadata Insight Center (KIC), indeks literasi digital Indonesia pada 2022 mencapai 3,54 dari skala 1-5, meningkat dari 3,49 pada 2021 dan 3,46 pada 2020. Survei ini mencakup empat pilar: *Digital Skills*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, dan *Digital Culture*.

Kabupaten Ciamis, sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi digital nasional, memiliki peran strategis melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam mengimplementasikan program literasi digital. Program ini menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan global, serta mempersempit kesenjangan digital di tingkat daerah.

Namun, dalam praktiknya, implementasi program literasi digital *berbasis Smart Society 5.0* di Kabupaten Ciamis menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi, tingkat pemahaman masyarakat yang belum merata, hingga koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi pelaksanaan program ini, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mendukung visi Kabupaten Ciamis sebagai masyarakat digital yang cerdas dan inklusif.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi diperlukan sumber daya manusia sebagai aset yang paling penting dan berharga serta merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia yang dalam pelaksanaannya dikelola dan diurus oleh manusia. Dengan demikian manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam rangka peningkatan SDM melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mengenai Implementasi Program Literasi Digital Berbasis *Smart Society 5.0* sejauh ini belum berjalan optimal. Adapun indikator-indikator permasalahan yang terjadi diantaranya: 1) Rendahnya tingkat literasi digital. Sebagian masyarakat belum memahami cara memanfaatkan teknologi digital secara optimal, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pekerjaan. 2) Minimnya pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sosial. Teknologi digital belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan atau pelayanan publik. 3) Kesenjangan digital antar wilayah. Wilayah pedesaan di Ciamis cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap teknologi informasi dibandingkan wilayah perkotaan. 4) Kurangnya pemahaman tentang konsep *Smart Society 5.0*. *Smart Society 5.0* mengintegrasikan teknologi dengan kehidupan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

Selanjutnya, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul: “Implementasi Program Literasi Digital Berbasis *Smart Society 5.0* di Kabupaten Ciamis (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis)”.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. (Dini Yuliani, 2023).

Menurut Garis, R. R. (2022), menyatakan bahwa: “Implementasi adalah Sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah yang diarahkan guna tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan terhadap suatu keputusan kebijakan dalam lembaga pemerintah”.

Pada dasarnya, implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya, implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara. (Syaukani dkk dalam Pratama, 2015:229).

Berbagai uraian tentang implementasi program dalam tulisan ini berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dalam Agustino (2016:169-170), bahwa: “Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan menggunakan tindakan-tindakan yang nyata serta sistematis dari Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi (penerapan).” Dari pendapat tersebut, implementasi hanya mengandung tiga aspek yang menjadi aktivitas utama dalam pelaksanaan implementasi, yaitu: 1) Organisasi, 2) Interpretasi, dan 3) Aplikasi (penerapan).

Pendapat Charles O. Jones menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang dirancang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan melalui tindakan-tindakan konkret yang dilakukan secara sistematis. Proses ini melibatkan tiga elemen utama: pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan tindakan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan, dengan tujuan untuk merealisasikan program dan mencapai target yang telah ditentukan.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. (Herdiana, 2018).

Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama dan Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial.

Definisi lain mengenai Kebijakan Publik Menurut Carl Friedrich (Leo Agustino, 2012:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (Kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (Kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir (Iskandar, 2012). Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.

Kebijakan pemerintah terkait literasi digital memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program berbasis teknologi, khususnya dalam konteks *Smart Society 5.0*. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai inisiatif untuk mempercepat transformasi digital, termasuk pengembangan literasi digital sebagai fondasi utama. Salah satu kebijakan nasional yang relevan adalah Program Literasi Digital Nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan produktif, sehingga mampu memanfaatkan teknologi digital untuk kesejahteraan dan efisiensi kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, kebijakan publik terkait literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi juga sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang cerdas secara digital, yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam pembangunan berbasis teknologi.

C. Literasi Digital

Literasi merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung dan menggunakan bahan cetak serta tulisan dalam kaitannya dengan berbagai pencapaian tujuan dalam mengembangkan pengetahuan serta potensi mereka, dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas mereka serta masyarakat (A'yuni, 2015).

Literasi pada era revolusi industri 4.0 menjadi hal yang perlu dibahas oleh para akademisi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah upaya untuk memahami kondisi zaman. Mau tidak mau masyarakat harus mengambil bagian di dalamnya supaya tidak tertinggal pada perkembangan zaman. Manusia memang perlu memperbarui pola hidup dan pemikiran setiap terjadinya revolusi pada semua ranah. Seperti halnya kurikulum pada ranah pembelajaran yang kerap kali dirubah. Hal ini terjadi karena kurikulum di Indonesia selalu menyesuaikan dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi (Fitriani & Abdul Aziz, 2019).

Literasi digital menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses, menafsirkan, dan menggunakan informasi digital dengan efektif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dalam menghadapi era 5.0 (Lestari, P., & Oktrimayunda, S. K;2024)

Dalam konteks *Society 5.0*, literasi digital menjadi komponen penting yang harus dimiliki masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi berbasis digital. Hal ini tidak hanya berlaku untuk individu tetapi juga untuk lembaga pemerintahan, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, yang bertugas mengintegrasikan teknologi digital dalam pelayanan publik. Literasi digital memungkinkan pemerintah daerah di Kabupaten Ciamis untuk mengoptimalkan

program berbasis teknologi, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga sebagai fondasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Peningkatan literasi digital di Kabupaten Ciamis akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih cerdas dan responsif terhadap perkembangan teknologi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Implementasi Program Literasi Digital Berbasis *Smart Society 5.0* di Kabupaten Ciamis (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data yang sifatnya primer dan sumber data yang bersifat sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara secara mendalam antara peneliti dan informan terpilih sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen (resmi dan tidak resmi) seperti buku, perundang – undangan, berbagai media dan profil lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian. Adapun aktifitas analisis data yang dilakukan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan serta verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Implementasi Program Literasi Digital Berbasis *Smart Society 5.0* di Kabupaten Ciamis (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis) menggunakan teori menurut Charles O. Jones dalam Agustino (2016:169-170), yang menyatakan bahwa Implementasi dapat terlaksana bila terdapat 3 (Tiga) dimensi yaitu: 1)Pengorganisasian, 2)Interpretasi, dan 3)Aplikasi (Terapan).

Selanjutnya penulis dapat memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan wawancara dan observasi yang berfokus mengenai Implementasi Program Literasi Digital Berbasis *Smart Society 5.0* di Kabupaten Ciamis (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis).

A. Organisasi

Organisasi, merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).

Pada dimensi organisasi, Diskominfo Kabupaten Ciamis telah menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi kebijakan literasi digital berbasis *Smart Society 5.0*, namun belum sepenuhnya berjalan optimal. Hambatan yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya ketersediaan sumber daya pelaksana yang kompeten, terutama dalam mengadopsi teknologi terbaru dan pemahaman konsep *Smart Society 5.0*. Selain itu sebagian pegawai masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat digital, memahami aplikasi literasi digital yang digunakan, serta dalam menyampaikan materi literasi kepada masyarakat secara interaktif dan adaptif. Hambatan lainnya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sepenuhnya tersedia dan dipahami secara merata oleh seluruh pelaksana, serta tantangan yang datang dari kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis terkait SOP, dan terbatasnya dukungan infrastruktur.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi pelatihan rutin dan *workshop* secara berkala guna meningkatkan literasi digital pegawai, serta pendampingan dan *mentoring* untuk mempercepat adaptasi dan memberikan dukungan langsung dalam praktik kerja sehari-hari. Selain itu, Diskominfo juga berupaya untuk segera menyusun dan mensosialisasikan SOP secara lengkap dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan di lapangan, diikuti dengan pelatihan teknis menyeluruh tentang implementasi SOP kepada seluruh pelaksana untuk menghindari kesenjangan pemahaman.

B. Interpretasi

Interpretasi, merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Pada dimensi interpretasi, Diskominfo Kabupaten Ciamis telah menjalankan strategi literasi digital secara komprehensif melalui berbagai pendekatan, termasuk publikasi digital, upaya pencegahan hoaks, peningkatan keamanan informasi, dan optimalisasi *platform* digital yang ada. Namun implementasi ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Hambatan yang dihadapi diantaranya adalah kerentanan terhadap

ancaman keamanan digital yang semakin meningkat seiring perkembangan teknologi, penyebaran hoaks yang cepat dan masif di masyarakat, keterbatasan kapasitas dan keterampilan digital yang merata di kalangan pelaksana, serta keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada media digital yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan atau masyarakat berusia lanjut.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi pembentukan tim khusus penanganan keamanan siber yang berfungsi untuk memantau, merespons, dan memulihkan sistem informasi apabila terjadi gangguan. Selanjutnya, Diskominfo merespons cepat terhadap hoaks melalui edukasi digital, serta melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pelaksana. Untuk mengatasi hambatan anggaran, Diskominfo memaksimalkan sumber daya yang tersedia secara gratis, seperti penggunaan media sosial dan platform internal (Hello Ciamis dan Super Desa), serta menggunakan pendekatan kreatif dan hemat biaya. Selain itu, untuk mengatasi ketergantungan pada media digital, Diskominfo menggunakan metode hybrid (gabungan antara daring dan luring) sebagai solusi strategis untuk memastikan sosialisasi kebijakan literasi digital tetap inklusif

C. Aplikasi (Terapan)

Aplikasi (penerapan), merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya.

Pada dimensi aplikasi, Diskominfo Kabupaten Ciamis telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan literasi digital melalui berbagai mekanisme, seperti monitoring berkala, pelaporan rutin, pemanfaatan aplikasi digital sebagai alat bantu, dan rapat koordinasi internal. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Adapun yang menjadi hambatannya adalah keterbatasan SDM, waktu, dan biaya operasional, terutama untuk menjangkau seluruh wilayah secara merata, khususnya daerah pedesaan yang memiliki cakupan geografis luas. Keterbatasan ini dapat memengaruhi intensitas kunjungan lapangan dan pemantauan langsung. Selain itu, dalam evaluasi, indikator keberhasilan program literasi digital masih bersifat beragam dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis, serta adanya hambatan terkait keterlibatan Diskominfo dalam penyusunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Diskominfo berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk monitoring jarak jauh dan menjalin kolaborasi dengan perangkat lokal guna memperluas jangkauan pengawasan, melakukan analisis internal

terhadap indikator capaian program, memanfaatkan hasil survei kepuasan layanan, serta memperkuat dokumentasi dan pelaporan digital. Dalam hal ketercapaian tujuan, meskipun kebijakan literasi digital belum sepenuhnya mencapai semua target, terutama karena keterbatasan sumber daya dan anggaran (misalnya, baru 11 dari 15 layanan yang berjalan), Diskominfo berupaya memaksimalkan implementasi layanan yang sudah berjalan sambil melakukan penjadwalan ulang dan skala prioritas terhadap layanan yang belum dapat dijalankan.

5. KESIMPULAN

Implementasi Program Literasi Digital Berbasis *Smart Society 5.0* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis, berdasarkan teori Charles O. Jones, menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal dilihat dari 3 dimensi. Pada dimensi Organisasi, hambatan utama terletak pada kurangnya kompetensi sumber daya pelaksana dalam mengadopsi teknologi terbaru dan memahami konsep *Smart Society 5.0*, serta belum meratanya pemahaman dan ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Upaya yang dilakukan meliputi pelatihan rutin, pendampingan, dan penyusunan SOP yang lebih komprehensif. Pada dimensi Interpretasi, Diskominfo telah menjalankan strategi literasi digital secara komprehensif, namun menghadapi tantangan signifikan seperti kerentanan terhadap ancaman keamanan siber, penyebaran hoaks yang masif, keterbatasan kapasitas digital pelaksana, serta kendala anggaran dan jangkauan sosialisasi yang belum merata, terutama di wilayah pedesaan. Upaya untuk mengatasi hambatan ini mencakup pembentukan tim penanganan siber, edukasi digital untuk melawan hoaks, peningkatan kapasitas SDM, serta penggunaan metode sosialisasi hybrid dan pemanfaatan sumber daya gratis. Terakhir, pada dimensi Aplikasi, pengawasan dan evaluasi program telah dilaksanakan, namun belum optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan SDM, waktu, dan biaya operasional untuk pengawasan lapangan yang merata, serta indikator keberhasilan yang belum terintegrasi secara sistematis. Selain itu, Diskominfo juga menghadapi keterbatasan dalam keterlibatan penyusunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Diskominfo berupaya memaksimalkan implementasi layanan yang ada dan melakukan penjadwalan ulang prioritas.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, N. H. (2018). Manajemen strategi pemasaran. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- A'yuni, Q. Q. (2015). Literasi digital remaja di Kota Surabaya: Studi deskriptif tentang tingkat kompetensi literasi digital pada remaja SMP, SMA dan mahasiswa di Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Dani, N. A., Endah, K., & Garis, R. R. (2022). Implementasi strategi pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pedagang pasar tradisional Kalipucang oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Pangandaran.
- Fauzi, & Marhamah. (2021, October). Pengaruh literasi digital terhadap pencegahan informasi hoaks pada remaja di SMP Negeri 7 Kota Lhokseumawe. Pekommas, 6, 77-84. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v6i2.4271>
- Fitriani, Y., & Aziz, I. A. (2019, March). Literasi era revolusi industri 4.0. In Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA) (Vol. 3, No. 1).
- Friedrich, C. J. (1963). Man and his government. New York, NY: McGraw-Hill.
- Garis, R. R. (2022). Implementasi: Tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3).
- Iskandar, A. (2012). Kebijakan dan implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pabrik garam. Jurnal Sosial Humaniora, 3(1).
- Lestari, P., Oktrimayunda, S. K., Istianatullaila, I., Nurpadilah, N., & Nursetiawan, I. (2024). Efektivitas program literasi digital berbasis Smart Society 5.0 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Public Service and Governance Journal, 5(2), 268-280. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1891>
- Nur Awalliyah, F., Sihabudin, A. A., & Yuliani, D. (2022). Implementasi program pengembangan destinasi pariwisata oleh badan promosi pariwisata daerah Kabupaten Ciamis. [Unpublished manuscript].
- Sugiyono. (2022). Penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, dkk. (2004). Artikel definisi tentang implementasi menurut ahli. Diakses dari www.dosenpendidikan.com